

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi hasil temuan dan pembahasan penelitian peran publik dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dengan studi kasus pada perbatasan darat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan ini terdiri dari kesimpulan umum dan khusus. Beranjak dari kesimpulan ini maka penulis juga mencoba mengajukan implikasi dan beberapa rekomendasi¹.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan pada sejumlah temuan penelitian yang diuraikan pada bahasan sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa peran publik seperti tokoh adat, tokoh, masyarakat dan tokoh agama dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya (*civic culture*) sangat penting demi terciptanya suasana aman damai di perbatasan darat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Masyarakat *Atoni Pah Meto* masih mempertahankan budaya atau tradisi penyelesaian sengketa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan, masyarakat *Atoni Pah Meto* (tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama) melakukannya dengan budaya *maloe mamat* (saling

¹ Heribertus Binsasi, 2019

PERAN PUBLIK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN NEGARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE MELALUI PENDEKATAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN (*CIVIC CULTURE*) (Studi Kasus pada Perbatasan Darat Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi)
Universitas Pendidikan Indonesia/repository.upi.edu/perpustakaan.upi.edu

menyuguhkan sirih pinang), *tok ma tamolok tabua* (dialog bersama), *natone* (ritual adat) dan *tiun menu* (ritual sumpah adat). Kebenaran nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan melalui pendekatan budaya tersebut telah teruji oleh waktu dan berlaku secara universal dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat *Atoni Pah Meto*.

2. Simpulan Khusus

Merujuk pada sub masalah penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut ini akan disajikan beberapa kesimpulan khusus dalam penelitian ini:

- 1) Peran publik dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *pertama*, peran tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah Indonesia atau Timor Leste seperti yang telah dilakukan di Oepoli Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 14 November 2017 dan pertemuanyang dilakukan di Oekusi (Timor Leste) pada tanggal 10 Desember 2018; *Kedua* peran tokoh adat, tokoh masyarakat dalam melakukan survey di wilayah perbatasan seperti survey yang dilakukan pada tahun 2005 dimulai dari titik perbatasan Bijaelsunan sampai titik perbatasan Oben.
- 2) Proses penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan

(*civic culture*) di Oepoli (Indonesia) dan Oekusi (Timor Leste) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap I, kedua belah pihak bertemu kemudian melakukan *maloe mamat* (saling menyuguhkan sirih pinang) sebagai wujud saling menghargai dan menghormati, tahap II pelaksanaan proses penyelesaian yaitu kedua belah pihak melakukan *tamolok tabua* (dialog bersama) secara musyawarah mufakat dengan menghasilkan beberapa kesepakatan seperti a) memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi *Nekaf Mese Ansaof Mese Atoni Pah Meto*; b) mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah dititahkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan kedua negara; c) menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya dan ekonomi; d) mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah adat mereka; e) garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan; f) Hasil pertemuan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara; g) Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik batas yang belum diselesaikan. Setelah menetapkan keputusan tersebut kedua belah pihak melakukan *natone* (ritual adat) sebagai bentuk doa dan ungkapan syukur. Tahap III (terakhir) kedua kelompok masyarakat melakukan *tiun menu* (ritual sumpah adat)

sebagai bentuk ungkapan sahnya kesepakatan yang telah disepakati bersama.

- 3) Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yaitu nilai saling menghargai dan menghormati, cinta kasih dan cinta damai, persaudaraan, kebersamaan, persatuan, tolong menolong dan keadilan. Selain itu, proses penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste melalui pendekatan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) juga terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi Pancasila yaitu nilai ketuhanan yang terdapat dalam budaya *natone* (ritual adat) sebagai ungkapan doa syukur kepada Tuhan melalui perantaraa leluhur. Nilai kemanusiaan terwujud dalam budaya *maloe mamat* sebagai bentuk saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Nilai persatuan terwujud dalam tema pertemuan yaitu *nekaf mese ansaof mese atoni pah meto* (satu hati satu pikiran sebagai orang Timor). Nilai kerakyatan terwujud dalam budaya *tamolok tabua* (dialog bersama) secara musyawarah mufakat; dan nilai keadilan sosial terwujud dalam budaya *tamolok tabua* (dialog bersama) untuk menyepakati garis batas secara adil.

B. Implikasi

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga domain atau bidang kajian yaitu; domain akademis, kurikuler dan sosio-kultural. Domain akademis berkaitan dengan pemikiran tentang pendidikan

kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler berkaitan dengan konsep dan praktis pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal, non formal dan informal. Sedangkan domain sosio-kultural berkaitan dengan konsep praktis pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Domain sosio-kultural memberikan ruang kepada pendidikan kewarganegaraan untuk berpartisipasi aktif dalam membekali warga negara tentang pengetahuan, agar dapat berpartisipasi aktif dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berada dalam ruang lingkup kebudayaan, baik dalam bentuk benda-benda, kegiatan kemasyarakatan dan pelestarian nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan masyarakatnya itu sendiri.

Pendidikan kewarganegaraan menempati posisi yang sangat strategis dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena secara substansial keilmuan pendidikan kewarganegaraan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Selain itu pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam upaya pembentukan karakter bangsa khususnya karakter warga negara agar berperan aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan masyarakat serta tentunya untuk pelestarian budaya daerah/lokal serta nasional.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara praktis terhadap pemerintah Indonesia dan Timor Leste serta masyarakat perbatasan dalam proses pelestarian tradisi (budaya daerah), dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah perbatasan yang sangat kompleks melalui pendekatan budaya masyarakat lokal. Selain itu agar bisa mengolah potensi daerah untuk meningkatkan pemahaman kearifan lokal kepada generasi penerus tanpa merubah nilai yang terkandung di dalamnya. Menjaga tradisi leluhur merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam.

Nilai kearifan lokal adalah salah satu hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan karakter bangsa. Kearifan lokal tidak selamanya ketinggalan zaman, namun kearifan lokal juga mengalami perubahan agar dapat diterima oleh generasi berikutnya tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal dalam lingkup tradisi dalam bentuk kebudayaan yang lebih luas makna dan nilai terkandung di dalamnya harus digali untuk membangun karakter bangsa. Masyarakat yang hebat adalah masyarakat yang menjaga nilai-nilai luhur dan berpedoman kepada kearifan lokal yang digali dari budaya lokal masyarakat

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kementerian luar negeri Indonesia dan Timor Leste, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Masyarakat Atoni Pah Meto, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan peneliti selanjutnya

1) Kementerian Luar Negri Indonesia dan Timor Leste

- a. Agar memperhatikan hasil atau rekomendasi setiap pertemuan masyarakat lokal sebagai dasar pertimbangan dalam negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan.
- b. Memperhatikan data hasil survei yang diperoleh dari masyarakat maupun keadaan di lapangan sebagai bukti dalam negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan.
- c. Melakukan negosiasi dengan Kementrian Luar Negri Timor Leste maupun Indonesia melalui diplomasi lokal secara kontinyu.
- d. Perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat yaitu Kementrian Luar Negri sehingga daerah yang berbatasan langsung bisa mampu dan dengan mudah mengelolah dan mengatur pembangunan di wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang negara dan pintu gerbang internasional.

2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Memfasilitasi tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah perbatasan dalam pertemuan-pertemuan

melalui pendekatan budaya secara rutin yaitu satu tahun dilakukan 2 (dua) kali.

- b. Membangun konsolidasi dengan melibatkan semua tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memegang peranan penting diantara kedua kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan yang benar tentang sejarah pembagian wilayah pada zaman dahulu.
- c. Membentuk lembaga adat yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat agar tugas dan fungsi masyarakat lokal di wilayah perbatasan dapat terkontrol dengan baik.

3) Masyarakat *Atoni Pah Meto* di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi

- a. Agar tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam kebudayaan *maloe mamat*, *tok ma tamolok tabua*, *natone* dan *tiun menu* supaya tetap bertahan sampai pada generasi yang akan datang, melalui budaya tersebut mampu menjadi perekat antar kedua kelompok warga akibat gap garis batas yang memisahkan mereka. Nilai-nilai kearifan lokal dalam kebudayaan *maloe mamat*, *tok ma tamolok tabua*, *tiun menu* sebagai *civic culture* dapat membentuk kepribadian warga negara.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan sesuai dengan janji dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

- c. Menjalin persaudaraan dan persahabatan dengan tidak menghilangkan sikap nasionalisme sesuai ideologi negara masing-masing.

4) Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mengembangkan proses pembelajaran budaya kewarganegaraan (*civic culture*) sebagai salah satu bidang kajian pendidikan kewarganegaraan berbasis teori dan praktik. Terbatasnya pembelajaran tentang budaya kewarganegaraan (*civic culture*) secara teori dan praktik akan berdampak pada intelektualitas warga negara terhadap identitas kewarganegaraan sebagaimana yang terdapat dalam ideologi bangsa dan negara yaitu Pancasila.
- b. Melakukan pengembangan kajian terhadap isu-isu terkini dalam masyarakat. Pembaharuan terhadap kajian pendidikan yang berbasis pada isu-isu terkini, akan menjadi bagian dari upaya peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi dalam pemecahan masalah warga negara.
- c. Mendorong adanya perbaikan terhadap pendidikan berbasis kearifan lokal. Esensi dari pendidikan ialah transformasi nilai. Memetakan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam setiap kebudayaan dapat mendorong pembentukan jati diri warganegara.

- 5) Peneliti selanjutnya untuk mengembangkan lagi penelitian terkait dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam kebudayaan

*Atoni Pah Metosebagai civic culture dalam masyarakat dengan
research and development.*